

SRAGEN TERIMA BANTUAN OPERASIONAL 200 JUTA-PERALATAN BENCANA DARI BADAN NASIONAL PENANGANAN BENCANA (BNPB)



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1709796983011-IMG-20240307-WA0013/pist2slxupq7mka.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Sragen: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian terkait rentetan bencana alam di Kabupaten Sragen. BNPB menyerahkan dana operasional Rp 200 juta dan berbagai peralatan penanganan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen.

Bantuan diserahkan Deputy Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dr. Lilik Kurniawan. Bantuan diterima langsung Kepala Ex Officio BPBD Sragen dr. Hargianto di Sekretariat Daerah Pemkab Sragen, Kamis (7/3/2024).

"Kami dari BNPB mewakili Kepala, memberikan atensi keprihatinan kami dari BNPB atas kejadian banjir dan longsor di Sragen. Kami menyampaikan bantuan uang untuk operasional penanganan darurat bencana ini sebesar Rp 200 juta, dan juga beberapa peralatan dan logistik yang dibutuhkan penanganan dampak (bencana)," ucap Lilik Kurniawan, kepada wartawan se usai acara serah terima.

Anggaran tersebut digunakan untuk operasional BPBD yang sudah melakukan mitigasi dan penanganan bencana. Sementara Pemda belum dapat mencairkan BTT (belanja tak terduga) untuk penanganan bencana.

"Untuk operasional BPBD yang dikelola BPBD. Mereka sudah bekerja datang ke lokasi bencana memberikan dukungan, kadang-kadang tidak terencana sehingga mereka butuh fresh money untuk melakukan itu. Pemda punya BTT ada prosesnya, kalau BTT belum turun ini dukungan BPBD," kata dia.

Dikatakan Kurniawan, pihaknya ingin memastikan penanganan darurat bencana di Sragen sudah berjalan dengan baik. Masyarakat terlindungi nyaman tidak ada kekurangan apapun.

"Untuk itu kami akan meninjau ke lapangan (lokasi longsor di Sambirejo) untuk memastikan itu. Kami ingin kondisi darurat ini ingin tertangani dengan baik," ujarnya.

BNPB juga memberikan arahan kedepan Pemkab Sragen strategi mitigasi bencana supaya banjir tahun depan tidak terjadi, termasuk tanah longsor tidak terjadi. Pihaknya sudah mitigasi melibatkan OPD di Sragen sehingga semua OPD tahu tugasnya tidak hanya BPBD.

"BPBD hanya satu dari sekian banyak OPD termasuk mengajak masyarakat sadar bencana. Mereka yang tinggal di KRB harus melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan sesuai dengan porsinya. Kalau masyarakat ya untuk menyelamatkan keluarganya, ketua RT, RW, Lurah harus melakukan upaya untuk menyiapkan jalur dan tempat evakuasi," kata dia.

Dikatakan Lilik, BNPB memastikan daerah bencana itu tidak digunakan untuk hunian. Namun apabila masyarakat tidak dapat dipindahtangankan karena berbagai hal. Maka pemerintah harus melakukan mitigasi kesiapsiagaan, sehingga masyarakat selamat ketika bencana terjadi.

"Memang intinya ada tiga dalam penanganan bencana itu, pertama menjauhkan bencana dari masyarakat, jangan sampai di sekitar bencana ada masyarakat. Tapi itu sulit karena masyarakat kita banyak yang tinggal di KRB," katanya.

Kemudian langkah lain menjauhkan masyarakat dari bencana. Namun juga tidak mudah, lantaran masyarakat memiliki lokal wisdom.

"Maka yang kita pilih yang terakhir masyarakat tinggal di situ dengan leaving harmony with risk, hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Artinya sudah tidak ada lagi tawar menawar, mereka harus melakukan mitigasi, kesiapsiagaan pemda menyiapkan dini yang ada di sana sehingga pada saat ada ancaman informasi itu sampai ke masyarakat," kata dia menjelaskan.

Kepala ex officio BPBD Sragen Hargianto menyampaikan terimakasih atas bantuan BNPB untuk operasional BPBD. Dia mengakui Pemda kesulitan untuk mengeluarkan BTT.

"Karena kalau di daerah mengeluarkan BTT kan harus berproses, lha ini terimakasih ada dana operasional dan alat-alat memang yang sangat kita butuhkan," kata Hargianto disela mendampingi kunjungan BNPB.MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/584237/sragen-terima-bantuan-operasional-200-juta-peralatan-bencana-dari-bnpb>, “Sragen Terima Bantuan Operasional 200 Juta-Peralatan Bencana dari BNPB”, tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/844416929/pancainan-anggaran-belanja-tidak-terduga-untuk-tangani-bencana-di-sragen-butuh-proses-lama-untung-bnpb-tanggap>, “Pancainan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Tangani Bencana di Sragen Butuh Proses Lama, Untung BNPB Tanggap”, tanggal 7 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi